

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Untuk memahami tentang tata kelola perusahaan dibutuhkan *agency theory* sebagai dasarnya. Keagenan merupakan hubungan yang dijalin antara dua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai agent dan pihak yang lain bertindak sebagai principal (Hendriksen dan Van Breda dalam Aziz, 2014). *Agency Theory* menyatakan bahwa setiap perusahaan penting untuk menyerahkan pengelolaan kepada tenaga profesional untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis dalam perusahaan. Tujuan dari pemisahan kepemilikan ini agar perusahaan dan pemiliknya memiliki keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Tenaga profesional tersebut bekerja untuk kepentingan perusahaan serta memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan (Ferial dan Handayani, 2016). Didalam hubungan keagenan, dimana manajer sebagai pihak yang mempunyai akses langsung terhadap informasi apa saja yang disajikan atau diungkapkan perusahaan, mempunyai asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, misalnya kreditor atau investor. Untuk dapat memperkecil asimetri informasi tersebut, maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disetujui tanpa ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan didasari oleh *teori agency* yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

### 2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat (Fatoni dkk, 2016). Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013). Legitimasi masyarakat dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik dimasyarakat maupun dilingkungan tempat beroperasi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan, dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak memperlakukan keberadaan perusahaan tersebut.

### 2.1.3 Teori *Stakeholder*

*Stakeholder* adalah semua pihak internal maupun eksternal, seperti: pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan, dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi, 2014).

Robert dalam (Nur dan Priantinah, 2012) mengatakan pengungkapan sosial perusahaan merupakan kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan hubungannya dengan *stakeholder* mereka, dengan adanya teori *stakeholder* ini, memberikan dasar bahwa suatu manfaat bagi para *stakeholder*-nya. manfaat tersebut dapat berupa penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan program

tanggung jawab sosial pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan para *stakeholder* dan melaporkannya juga kepada *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan jika para *stakeholder* sebenarnya memiliki hak penuh atas semua informasi wajib maupun sukarela mengenai informasi keuangan dan non-keuangan yang didalamnya menjelaskan pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan kepada para *stakeholder*.

## **2.2 Tata Kelola Perusahaan (TKP)**

### **2.2.1 Pengertian tata kelola perusahaan**

Tata kelola perusahaan (TKP) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip TKP sejak menandatangani *Letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional *Corporate Governane* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar TKP yang telah ditetapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar (Tunggal, 2012:24). Sedangkan menurut (Agoes, 2011: 101) tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antar karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya sebuah tujuan.

Dalam perbankan syariah, penerapan tata kelola perusahaan telah diatur oleh Bank Indonesia melalui dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam setiap kegiatan usahanya bank diwajibkan melaksanakan tata kelola perusahaan sebagaimana tercantum dalam PBI pasal 2 ayat 1, yang berbunyi "Bank wajib melaksanakan tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi".

#### 2.2.2 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 2014)

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki anggota komite audit akan membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam perusahaan akan lebih ketat sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak baik dari auditor internal. Menurut (Febhiant dan Setyaningrum, 2013) sebagai pihak yang independen, komite audit ini diharapkan dapat menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan yang merupakan bentuk dari tata kelola perusahaan untuk dapat mengurangi *agency problem*. Dengan berkurangnya *agency problem* ini nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen.

### 2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak investor institusional dari berbagai bidang perusahaan dan lembaga keuangan. Pihak institusional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap manajemen perusahaan seiring dengan jumlah persentase kepemilikan yang besar yang ditanamkan oleh investor. Sebagai agen pengawas, kepemilikan institusional memiliki hak untuk dapat memonitor kegiatan operasional perusahaan (Septiana *et al*, 2016)

Menurut (Thesarani, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun.

## 2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### 2.3.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut (Purwanto 2011), tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pernyataan umum yang mengindikasikan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan yang dilakukan guna menyediakan dan memberikan kontribusi kepada *stakeholder*. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban sosial yang dilakukan perusahaan bertujuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mewujudkan harmonisasi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.

Pendapat lain menurut (Ardianto dan Machfudz, 2011:34) tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

Adapun definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut (Gassing, 2016:163). Mengemukakan bahwa didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut *World Business Council for Sustainable Development* mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, secara garis besar tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya.

Sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit), masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*); serta lingkungan hidup (planet bumi).

*Triple Bottom Line* dengan 3P tipe yaitu:

1. Profit yang mendukung laba perusahaan.
2. *People* yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Planet yang meningkatkan kualitas lingkungan.

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan sangat beragam. Intinya dari definisi tanggung jawab sosial perusahaan diatas merupakan komitmen perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah kerja perusahaan tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

## **2.4 Kinerja Keuangan**

### **2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akutansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accouting Principle*). (Fahmi, 2011:2). Sedangkan menurut (Rudianto 2013: 189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan.

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan dalam menggunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

#### 2.4.2 Return On Asset (ROA)

*Return On Asset* merupakan rasio dari profitabilitas yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014: 201). Menurut (Fahmi, 2012:98) *return on assets* yaitu melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan.

Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka penulis dapat mengambil keputusan bahwa *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik (tinggi) nilai ROA suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerjanya dalam menghasilkan laba bersih.

Penulis akan menggunakan rasio ROA, dengan alasan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. ROA paling sering digunakan investor dalam menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan. Disamping itu, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

ROA merupakan ukuran yang penting dan sering dijadikan acuan oleh investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi investor untuk membuat keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan tersebut..

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan pengaruh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan:

1. Karjaya (2014), melakukan penelitian berjudul pengaruh tingkat pengungkapan CSR dan mekanisme GCG pada kinerja keuangan perusahaan pertambangan. Jumlah populasi perusahaan adalah 37 perusahaan, selanjutnya jumlah sampel adalah sebanyak 14 perusahaan pertambangan, yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada kinerja keuangan, dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, Kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada kinerja keuangan.
2. Sari (2016), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ekplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi BEI dan website resmi perusahaan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.
3. Mulyasari (2017), melakukan penelitian dengan judul pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja keuangan.
4. Andika (2018), melakukan penelitian dengan judul pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. GCG yang digunakan adalah kepemilikan insitusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap kinerja keuangan, sedangkan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan komite audit memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

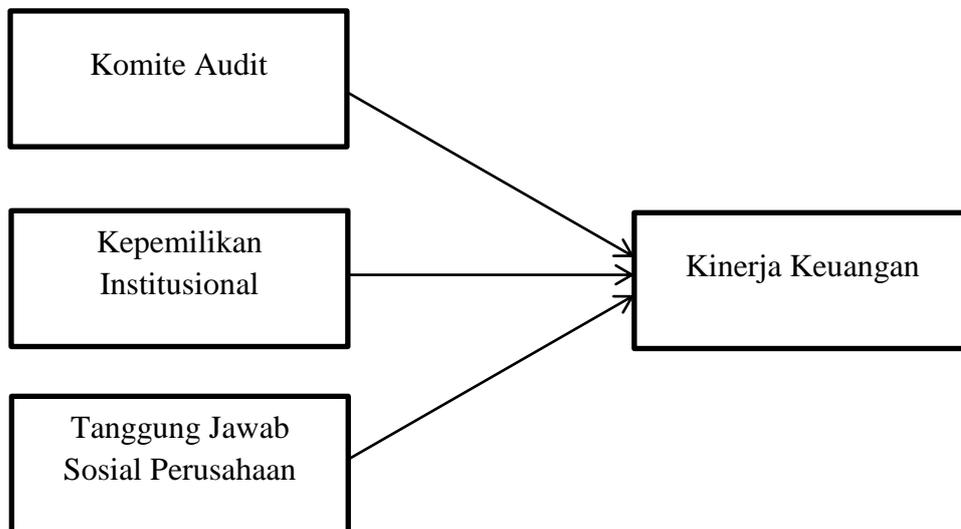
No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
1	Karjaya (2014), Pengaruh tingkat pengungkapan CSR dan mekanisme GCG pada kinerja keuangan (Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012).	CSR, GCG, ROA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CSR berpengaruh positif pada kinerja keuangan</li> <li>2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada kinerja keuangan</li> <li>3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan</li> <li>4. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada kinerja keuangan</li> </ol>
2	Sari (2016), Pengaruh pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan (Studi Komparatif pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI 2012-2015).	CSR, ROA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan</li> </ol>
3	Mulyasari (2017), Pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja	GCG, Kepemilikan Manajerial,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> </ol>

	keuangan (Studi pada perusahaan <i>Food and Beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015).	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, ROA	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> <li>3. Komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>4. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja keuangan.</li> </ol>
4	Andika (2018), Pengaruh penerapan GCG terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016).	GCG, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan ROA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>2. Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>3. Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.</li> </ol>

## 2.6 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori diatas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka konsep yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan ialah sebagai berikut:

**Gambar 1 Model Kerangka Konsep**



## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan**

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal, sehingga komite audit dipandang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan tersebut. Komite audit mampu melindungi kepentingan para pemegang saham dari kecurangan yang dapat dilakukan pihak manajemen. Komite audit terbentuk agar kredibilitas laporan keuangan perusahaan dapat terjamin. Dengan berjalannya komite audit secara efektif, maka fungsi pengawasan perusahaan akan baik dan kinerja keuangan perusahaan tentunya akan baik. (Noviawan dan septiani, 2013)

Dari penjelasan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA.

### **2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan**

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar dalam memonitoring terhadap investasi yang dilakukan perusahaan termasuk investasi

saham. Dengan adanya kepemilikan sebagian besar saham oleh pihak institusional maka manajemen perusahaan akan meminimalisir adanya kecurangan karena para manajer merasa diawasi secara optimal oleh pemilik sebagian saham yang mereka kelola. Lebih banyak saham perusahaan yang dimiliki pihak institusional maka akan lebih optimal pengawasan kinerja dalam mengelola saham perusahaan, sehingga meminimalisir adanya manipulasi oleh manajemen dan membentuk keselarasan antara keinginan *principal* dengan *agen* yang berdampak pada ketertarikan investor dalam menginvestasikan hartanya sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. (Widyati, 2013)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA.

### **2.7.3 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan**

Secara teoritis dan empiris laporan pertanggung jawaban sosial penting bagi perusahaan untuk membangun citra dan menjaga reputasi, serta legitimasi investor. Perusahaan akan berusaha untuk memperluas cakupan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, agar masyarakat dan investor percaya perusahaan dapat mendukung kinerja keuangan yang baik.

Biaya tanggung jawab sosial perusahaan secara pasti akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, namun sebenarnya biaya tanggung jawab sosial perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan yang nilainya bisa saja lebih besar dari biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikeluarkan, sehingga meningkatkan perolehan laba. Dengan demikian dikatakan bahwa biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang dikeluarkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. (Yudharma, 2016)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan